

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

Pada bab ini akan memuat dan mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Dana perimbangan, Belanja modal, Pertumbuhan ekonomi (PDRB), dan kemiskinan (Jumlah Penduduk Miskin) serta dampaknya terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Tujuan dari penelitian terdahulu adalah sebagai referensi dan pendukung dalam penelitian, sekaligus memperkuat hasil analisis, adapun penelitian-penelitian tersebut antara lain ;

Lugastoro (2013) melakukan penelitian menggunakan data panel dengan *cross section* berjumlah 38 kabupaten/kota di Jawa Timur dan *time series* tahun 2006-2011 dengan menggunakan metode analisis *random effect model*. Variabel dependen yang digunakan adalah IPM, dan variabel independennya ialah rasio pendapatan asli daerah terhadap belanja modal (PAD/BM), rasio dana alokasi umum terhadap belanja modal (DAU/BM), rasio dana alokasi khusus terhadap belanja modal (DAK/BM), rasio total dana bagi hasil terhadap belanja modal (DBH/BM), dan pertumbuhan ekonomi. Hasil estimasi yang diperoleh dari penelitian ini adalah variabel DAU berpengaruh negatif signifikan, variabel DAK berpengaruh positif signifikan, variabel DBH berpengaruh positif tidak signifikan. Sehingga kesimpulan dari penelitian ini ialah dana perimbangan kurang berpengaruh dalam peningkatan IPM, hanya variabel DAK yang berpengaruh positif signifikan, variabel DAU berpengaruh negatif sedangkan DBH tidak signifikan mempengaruhi IPM.

Christina (2011) melakukan penelitian menggunakan data panel dengan *cross section* berjumlah 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah dan dalam kurun waktu 3 tahun (2007-2009), dengan variabel dependen ialah Indeks Pembangunan manusia (IPM) sedangkan variabel independen antara lain; kemiskinan (jumlah penduduk miskin), pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, dan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa variabel kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia provinsi Jawa Tengah.

Jurnal penelitian yang ditulis oleh Denni Sulistio Mirza (2012) yang berjudul “Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Terhadap IPM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006-2009”. Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel terhadap indeks pembangunan manusia. Estimasi model menggunakan metode data panel. Hasil estimasi data memberikan bukti bahwa variabel kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta belanja modal juga berpengaruh positif dan signifikan dengan elastisitas positif sebesar 0,274209 terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah tahun 2006-2009.

Ng’habi (2012) dalam penelitian “Economic Growth and Human Development; A Link Mechanism : An Empirical Approach” menyampaikan penelitian tentang hubungan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia (HDI). Penelitian ini menggunakan data dari Human Development Report 2011 yang diterbitkan oleh UNDP dengan sampel 40 negara. Metode yang dipakai

adalah regresi berganda dengan variabel pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan melalui pendapatan perkapita ( $Y$ ), pembangunan manusia (HDI), ketidaksetaraan IPM (*inequality-adjusted HDI*), dan ketidaksetaraan gender (*gender inequality index, GII*). Melalui penelitian ini diperoleh hasil bahwa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia memiliki hubungan yang erat, dimana pembangunan manusia merupakan input dari pertumbuhan ekonomi namun pada gilirannya pertumbuhan ekonomi akan mengaktifkan/menaikkan pembangunan manusia.

Swandewi (2014), melakukan penelitian dengan menggunakan teknik analisis adalah analisis jalur (*path analysis*) yang merupakan perluasan dari analisis regresi linier berganda untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel (*model causal*) yang diolah dengan menggunakan program SPSS. Hasil analisis menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat pada kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Christy Fhino Andrea & Priyo Hari Adi (2009), melakukan penelitian mengenai hubungan antara dana alokasi umum, belanja modal dan kualitas pembangunan manusia di Jawa Tengah. Dengan menggunakan regresi sederhana hasilnya menunjukkan bahwa dana alokasi umum mempunyai pengaruh positif terhadap belanja modal, dan belanja modal berpengaruh terhadap kualitas pembangunan manusia.

## 2.2. Landasan Teori

### 2.2.1. Pembangunan Manusia

*United Nation Development Program* (UNDP) mendefinisikan pembangunan manusia sebagai suatu “proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk” (*Human Development Report*, 2001), dalam arti bahwa manusia diberi pilihan yang lebih banyak dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang menyangkut ekonomi, sosial, dan budaya. Terdapat tiga hal yang dianggap penting dalam pemilihan yang dilakukan oleh manusia, yaitu memiliki kehidupan yang panjang dan sehat, untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan memiliki akses terhadap sumber daya yang diperlukan, untuk mendapat standar hidup yang layak. Apabila tiga faktor kritis tersebut tidak dipenuhi maka, banyak pilihan lainnya yang tidak akan dapat dicapainya, misalnya kemerdekaan politik, ekonomi, sosial, serta kesempatan untuk memperoleh tingkat produktivitas yang tinggi, menikmati rasa terhormat dan hak-hak azasi manusia

Konsep pembangunan manusia dalam pengertian di atas jauh lebih luas daripada teori pembangunan ekonomi yang konvensional, termasuk model pertumbuhan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia (SDM), pendekatan kesejahteraan, dan pendekatan kebutuhan kebutuhan dasar manusia. Model pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan peningkatan pendapatan dan produksi nasional (GNP). Pembangunan SDM menempatkan manusia terutama sebagai input dari proses produksi (sebagai suatu sarana bukan tujuan). Pendekatan kesejahteraan melihat manusia sebagai pemanfaat (*beneficiaries*) bukan sebagai

objek perubahan. Pendekatan kebutuhan-kebutuhan dasar memfokuskan pada penyediaan barang dan jasa kebutuhan hidup.

### **2.2.2. Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indeks komposit yang juga merupakan indikator yang dapat menggambarkan perkembangan pembangunan manusia secara terukur dan representative. IPM diperkenalkan pertama kali pada tahun 1990 oleh UNDP.

Menurut BPS (2009), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran capaian pembangunan berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Indeks Pembangunan Manusia dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan ke empat komponen, yaitu angka harapan hidup yang mengukur keberhasilan dalam bidang kesehatan, angka melek huruf dan rata – rata lamanya bersekolah yang mengukur keberhasilan dalam bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata – rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mengukur keberhasilan dalam bidang pembangunan untuk hidup layak.

Nilai IPM suatu negara atau wilayah menunjukkan seberapa jauh negara atau wilayah itu telah mencapai sasaran yang ditentukan yaitu angka harapan hidup 85 tahun, pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat (tanpa kecuali), dan tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup layak. Semakin dekat nilai IPM suatu wilayah terhadap angka 100, semakin dekat jalan yang harus ditempuh untuk mencapai sasaran itu.

Penghitungan IPM sebagai indikator pembangunan manusia memiliki tujuan penting, diantaranya:

- a) Membangun indikator yang mengukur dimensi dasar pembangunan manusia dan perluasan kebebasan memilih.
- b) Memanfaatkan sejumlah indikator untuk menjaga ukuran tersebut sederhana.
- c) Membentuk satu indeks komposit dari pada menggunakan sejumlah indeks dasar.
- d) Menciptakan suatu ukuran yang mencakup aspek sosial dan ekonomi.

Dalam indeks pembangunan manusia terdapat tiga komposisi indikator yang digunakan untuk mengukur besar indeks pembangunan manusia suatu negara, yaitu :

1. Tingkat kesehatan diukur harapan hidup saat lahir (tingkat kematian bayi).
2. Tingkat pendidikan diukur dengan jumlah penduduk yang melek huruf atau tingkat pendidikan yang telah dicapai atau lamanya pendidikan seorang penduduk.
3. Standar kehidupan diukur dengan tingkat pengeluaran perkapita per tahun.

IPM merupakan rata-rata dari ketiga komponen tersebut, dengan rumus:

$$\text{IPM} = (\text{X1} + \text{X2} + \text{X3}) / 3$$

dimana:

**X1** = Angka harapan hidup

**X2** = Tingkat pendidikan

**X3** = Tingkat kehidupan yang layak

Secara detail, prosedur penghitungan IPM ialah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**

**Nilai Maksimum dan Minimum dari Setiap Komponen IPM**

<b>Komponen IPM</b>	<b>Maksimum</b>	<b>Minimum</b>	<b>Keterangan</b>
1. Angka Harapan Hidup	85	25	Standar UNDP
2. Angka Melek Huruf	100	0	Standar UNDP
3. Rata-Rata Lama Sekolah	15	0	Standar UNDP
4. Daya Beli	732.720a)	300.000 (1996) 360.000 b) 1999,2002	UNDP menggunakan PDB riil disesuaikan

**Sumber: BPS (2009)**

### 2.2.3 Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Kuncoro, 2014). Menurut UU no.25 / 1999 pasal 6, dana perimbangan terdiri dari :

- 1) Bagian daerah (Dana Bagi Hasil) dari PBB, BPHTB, PPh, orang pribadi dan SDA
- 2) Dana Alokasi Umum (DAU)
- 3) Dana alokasi khusus (DAK)

#### 2.2.3.1 Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH dibedakan menjadi :

- a) Dana Bagi Hasil Pajak yaitu dana bagi hasil dari perpajakan, yang terdiri dari PBB, BPHTB dan PPh
- b) Dana Bagi Hasil Pajak Sumber Daya Alam yaitu bagi hasil yang bersumber dari SDA (kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, pertambangan panas bumi) yang terdiri dari Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH), pemberian hak atas tanah negara, landrent dan penerimaan dari uang eksplorasi

#### **2.2.3.2 Dana Alokasi Umum**

Dana alokasi umum (DAU) merupakan *block grant* yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya, dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak dari daerah kaya. Dengan kata lain, tujuan penting DAU adalah dalam kerangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik antar pemda di Indonesia. UU. 25/1999 pasal 7 menggariskan bahwa pemerintah pusat berkewajiban menyalurkan paling tidak 25% dari penerimaan dalam negerinya dalam bentuk DAU (Kuncoro, 2014).

Secara definisi, Dana Alokasi Umum dapat diartikan sebagai berikut (sidik, 2003)

1. Salah satu komponen dari dana perimbangan pada APBN, yang pengalokasiannya didasarkan atas konsep kesenjangan fiskal atau





KbF = Kebutuhan Fiskal

KpF = Kapasitas Fiskal

IKK = Indeks Kemahala Konstruksi

### 2.2.3.3 Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN dan bersifat “*Specific Grant*”, yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (berdasarkan UU No.33 tahun 2004 serta PP No. 55 tahun 2005) dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Pemerintah menetapkan DAK untuk suatu daerah dengan memperhatikan kriteria tertentu, meliputi; a) Kriteria umum, ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); b) Kriteria khusus, ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah; dan c) Kriteria teknis, ditetapkan oleh kementerian negara/ departemen teknis.

DAK tidak dialokasikan kepada semua daerah, namun hanya kepada daerah tertentu yang mempunyai kondisi khusus. Menurut Sidik (2002), yang dimaksud dengan kebutuhan/kondisi khusus adalah: 1) kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan yang tidak sama dengan kebutuhan daerah lain, misalnya: kebutuhan di kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis sarana/prasarana baru, pembangunan jalan di kawasan terpencil, saluran irigasi primer, dan saluran

*drainase primer*; dan 2) kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

Dana Alokasi Khusus ini apabila dikelola dengan baik, dapat memperbaiki mutu pendidikan, meningkatkan pelayanan kesehatan, dan paling tidak mengurangi kerusakan infrastruktur. Hal ini sangat penting untuk menanggulangi kemiskinan dan membangun perekonomian nasional yang lebih berdaya saing.

#### **2.2.4 Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut Sadono (2000), alat untuk mengukur keberhasilan perekonomian suatu wilayah adalah pertumbuhan ekonomi wilayah itu sendiri. Perekonomian wilayah akan mengalami kenaikan dari tahun ketahun dikarenakan adanya penambahan pada faktor produksi. Selain faktor produksi, jumlah angkatan kerja yang bekerja juga akan meningkat dari tahun ke tahun sehingga apabila dimanfaatkan dengan maksimal maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa alat pengukur dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu; Produk Domestik Bruto (PDB) yang mengukur pendapatan total dalam perekonomian (Mankiw, 2003) dan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk mengukur besarnya pertumbuhan ekonomi daerah .

Hal serupa juga disampaikan oleh (Boediono, 1985) yang mengartikan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output per kapita. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian daerah dalam suatu tahun tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan rumus :

- $\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{(\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1})}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100\%$

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah atau pendapatan dari seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah atau daerah pada satu periode tertentu. PDRB dihitung dalam dua cara, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku (pendapatan nominal) dan PDRB atas dasar harga konstan (pendapatan riil). Dalam menghitung PDRB atas dasar harga berlaku menggunakan harga barang dan jasa tahun berjalan, sedangkan pada PDRB atas dasar harga konstan menggunakan harga pada suatu tahun tertentu (tahun dasar).

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat salah satunya diukur melalui pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat meningkat apabila mempunyai beberapa faktor salah satunya ialah modal manusia (*Human Capital*) yang memadai. Dengan modal manusia yang berkualitas, kinerja ekonomi diyakini juga akan lebih baik, sesuai dengan yang dikatakan Mubyarto dalam Mailendra (2009) "*social development is economic development*". Menurut Todaro (2006), sumber daya manusia dari suatu bangsa merupakan faktor paling menentukan karakter dan kecepatan pembangunan sosial dan ekonomi dari bangsa yang bersangkutan.

Pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai pula dengan pendapat dari Professor Kuznet, dimana salah satu karakteristik pertumbuhan ekonomi modern adalah tingginya pertumbuhan output perkapita (Todaro, 2006). Pertumbuhan output yang dimaksudkan adalah PDRB per kapita, tingginya pertumbuhan output menjadikan perubahan pola konsumsi dalam pe-

menuhan kebutuhan. Artinya semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka akan semakin tinggi pertumbuhan output per kapita dan merubah pola konsumsi dalam hal ini tingkat daya beli masyarakat juga akan semakin tinggi. Tingginya daya beli masyarakat akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia karena daya beli masyarakat merupakan salah satu indikator komposit dalam IPM yang disebut indikator pendapatan. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.

### **2.2.5 Belanja Modal**

Belanja Modal adalah belanja yang dilakukan pemerintah yang menghasilkan aktiva tetap tertentu (Nordawati, 2006). Alokasi dana oleh pemerintah daerah dalam bentuk belanja modal dalam APBD bertujuan untuk meningkatkan investasi modal dalam bentuk aset tetap yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun fasilitas publik. Peningkatan kualitas layanan publik secara simultan akan berpengaruh kepada tingkat kesejahteraan masyarakat karena alokasi belanja untuk sarana pendidikan dan kesehatan juga akan bertambah.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 Tentang Klasifikasi Anggaran, belanja modal adalah pengeluaran untuk pembayaran perolehan asset dan/atau menambah nilai asset tetap/asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas

minimal kapitalisasi asset tetap/asset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual.

Indikator belanja Modal dapat dilihat dalam ringkasan dibawah ini :

**Belanja Modal** = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan + Belanja Aset Tetap Lainnya

### 2.2.6 Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan adanya ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk miskin adalah mereka yang asupan kalorinya di bawah 2.100 kalori berdasarkan kategori makanan dan bukan makanan diukur menurut infrastruktur, antara lain jalan raya, rumah, serta ukuran sosial berupa kesehatan dan pendidikan. Masalah kemiskinan ditimbulkan oleh hal yang sifatnya alamiah atau kultural dan oleh miskinnya strategi serta kebijakan pembangunan yang ada. Kemiskinan banyak dihadapi oleh rakyat Indonesia khususnya setelah krisis ekonomi pada tahun 1998, dimana tingkat kemiskinan cenderung naik dari tahun ke tahun.

Menurut Saputro (2010), ada beberapa teori yang menerangkan tentang faktor kemiskinan, yaitu :

a. Teori Lingkaran Setan Kemiskinan Oleh Ragnar Nurkse

Menurut Ragnar Nurkse, teori Lingkaran Setan Kemiskinan menjelaskan bahwa negara-negara sedang berkembang itu miskin, karena

produktivitasnya rendah, yang mengakibatkan penghasilan penduduk rendah, dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya yang minimum sehingga tidak dapat menabung (tabungan merupakan sumber utama pembentukan modal masyarakat).

b. Teori Perangkap Kemiskinan oleh Malthus

Teori Malthus, menunjukkan bahwa suatu saat pertumbuhan jumlah penduduk akan melebihi persediaan bahan makanan. Ketika keadaan ini terjadi akan mengakibatkan jumlah bahan makanan menjadi terbatas. Penduduk berpendapatan rendah yang tidak mendapatkan bahan menjadi miskin.

Kemiskinan menyebabkan seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara layak. Orang miskin memiliki kemampuan daya beli yang rendah sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhannya, baik kebutuhan fisik maupun non fisik. Keadaan tersebut membuat standar hidupnya menjadi rendah. Standar hidup yang rendah dapat berpengaruh buruk terhadap pembangunan manusia, karena standar hidup merupakan salah satu komponen dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam konsep pembangunan manusia ditunjukkan kemajuan manusia atau kemampuan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan non fisik. Kemiskinan merupakan kondisi yang berlawanan dengan pembangunan manusia. Maka dapat disimpulkan bahwa besarnya kemiskinan berhubungan negatif atau berlawanan dengan pembangunan manusia yang di ukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

### 2.2.6.1 Ukuran Kemiskinan

Beberapa macam kemiskinan yang sekaligus dapat dijadikan ukuran kemiskinan antara lain:

#### 1) Kemiskinan absolut

Kemiskinan ini dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan kebutuhan hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang mungkin untuk dapat hidup layak. Konsep ini untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidupnya (Todaro, 2006).

#### 2) Kemiskinan relatif

Kemiskinan ini lebih banyak ditentukan oleh keadaan sekitarnya, dari pada lingkungan orang yang bersangkutan.

#### 3) Kemiskinan kultural

Kemiskinan kultural yaitu kemiskinan yang berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.

### 2.2.6.2. Terminologi Kemiskinan

Menurut Badrudin (2012) terminology kemiskinan lain selain kemiskinan relative dan kemiskinan *absolute*, antara lain :

1. Kemiskinan struktural, adalah kemiskinan yang ditengarai disebabkan kondisi struktur atau tatanan kehidupan yang tak menguntungkan karena tatanan itu tidak hanya menyebabkan kemiskinan tetapi juga



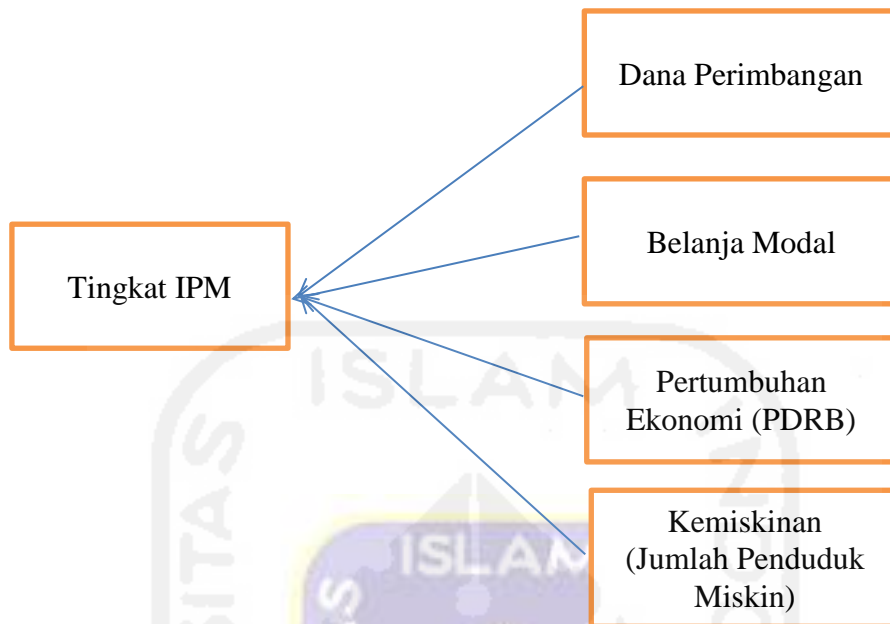
melanggengkan kemiskinan di dalam masyarakat. Di dalam kondisi struktur yang demikian itu, kemiskinan menggejala bukan oleh sebab yang alami melainkan oleh sebab tatanan sosial yang tidak adil. Tatanan yang tidak adil ini menyebabkan banyak warga masyarakat gagal memperoleh peluang dan/atau akses untuk mengembangkan dirinya serta meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga penduduk yang malang dan terperangkap ke dalam perlakuan yang tidak adil ini menjadi serba berkekurangan, tidak setara dengan tuntutan hidup yang layak dan bermartabat sebagai manusia.

2. Kemiskinan kultural, diakibatkan oleh faktor-faktor adat dan budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang tetap melekat dengan indikator kemiskinan. Padahal indikator kemiskinan tersebut seharusnya dapat dikurangi atau bahkan secara bertahap dapat dihilangkan dengan mengabaikan faktor-faktor adat dan budaya tertentu yang menghalangi seseorang melakukan perubahan-perubahan ke arah tingkat kehidupan yang lebih baik. Kemiskinan kultural adalah suatu ketidak berdayaan. Keberdayaan itu sesungguhnya merupakan fungsi kebudayaan. Artinya, berdaya tidaknya seseorang dalam kehidupan bermasyarakat dalam kenyataannya banyak ditentukan dan dipengaruhi oleh determinan-determinan sosial budayanya (seperti posisi, status, dan wawasan yang dimilikinya). Sebaliknya, semua fasilitas sosial yang teraih dan dapat didayagunakan olehnya akan ikut

menentukan keberdayaannya kelak di dalam pengembangan dirinya ditengah masyarakat.

Menurut Kuncoro dalam Badrudin (2012) penyebab kemiskinan adalah 1) secara mikro, kemiskinan karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah; (2) Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia yang rendah, berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumber daya ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau karena keturunan; (3) Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle poverty*). Adanya keterbelakangan, ketidak sempurnaan pasar, dan kurangnya modal mengakibatkan rendahnya produktivitas sehingga mengakibatkan rendahnya pendapatan yang diterima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi yang berkakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya.

### 2.2.3 Kerangka Pemikiran



### 2.2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan pandangan sementara dan pedoman serta arah dalam penelitian yang disusun berdasarkan pada teori yang terkait, dimana suatu hipotesis selalu dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang menghubungkan dua variabel atau lebih.

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H(X1). Diduga Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia kabupaten/kota di Provinsi Banten.

H(X2). Diduga Belanja Modal Berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia kabupaten/kota di Provinsi Banten.

H(X3). Diduga Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia kabupaten/kota di Provinsi Banten.

H(X4). Diduga Kemiskinan (Jumlah orang miskin) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia kabupaten/kota di Provinsi Banten.

